

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
WORKSHOP PENYUSUNAN PPRG BAGI KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional menjadi bagian tersendiri dalam rangka pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan di daerah. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah. Aturan ini memuat kebijakan perencanaan dan penganggaran dimana PPRG dipandang sebagai upaya pada tataran operasional untuk melaksanakan strategi PUG dalam pembangunan. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pada Perda PUG Pasal 6 menyatakan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG responsif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan pada pasal 7 menyatakan bahwa penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan metode Gender Analysis Pathway, SWOT, PROBA atau metode analisis lain. Selanjutnya dalam Pasal 31 menyatakan bahwa hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan GBS dan hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/0007589 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang mengamanatkan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun PPRG pada tiap tahun anggaran dan guna memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan bagi para perencana dan focal point gender OPD dalam penyusunan PPRG, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kabupaten/Kota Tahun 2022.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
11. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

C. Tujuan

Kegiatan Workshop Penyusunan PPRG Kabupaten/Kota bertujuan:

1. Memberikan pemahaman bagi perencana dan focal point gender untuk dapat menggunakan alat analisis gender dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender;
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam merumuskan dokumen anggaran responsif gender yang mampu menyelesaikan isu gender;
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun PPRG Tahun 2023 yang diutamakan dalam penanganan isu strategis dan pengurangan kesenjangan IPM dan IPG Jawa Tengah.

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender tahun 2023 menggunakan alat analisis gender untuk meningkatkan angka IPG dan IDG dan penyelesaian isu strategis di Jawa Tengah.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi Kabupaten/Kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi Kabupaten/Kota dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis - Jum'at, 28 - 29 Juli 2022

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat 6A, Kantor Bappeda Jawa Tengah

Jl. Pemuda No. 127 – 133 Semarang

C. Peserta

Peserta Workshop Penyusunan PPRG bagi Kabupaten/Kota terdiri dari unsur perencana atau focal point gender pada OPD urusan PPPA di tingkat Kabupaten/Kota.

D. Fasilitator

Fasilitator kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi Kabupaten/Kota berasal dari LPPSP Semarang.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi Kabupaten/Kota meliputi:

1. Ceramah
2. Praktek penyusunan PPRG
3. Paparan peserta

III. SUMBER DANA

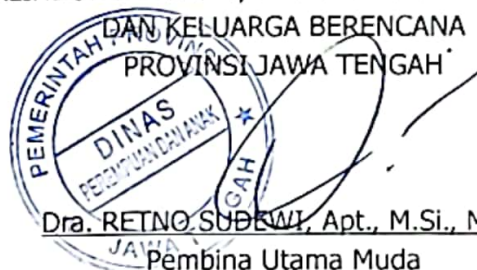
Sumber biaya Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi Kabupaten/Kota berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutaman Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.

IV. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi Kabupaten/Kota Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, Juli 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDAWI, Apt., M.Si., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001